



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M Fajar Sauri
Jabatan : Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Pramono Anung
Jabatan : Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

2025

PIHAK KEDUA,

Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Pramono Anung

PIHAK PERTAMA,

Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

M Fajar Sauri

NIP 197011181998031002

PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

Nama : M Fajar Sauri
 NIP : 197011181998031002
 Jabatan : Kepala Dinas
 Unit Kerja : Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber data	Pengukuran Kinerja	Target Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
Sasaran Strategis										
1	Penyediaan Ruang Terbuka dan Infrastruktur Hijau yang Inklusif dan Berkualitas	Persentase Ruang Terbuka Hijau	Sistem Monev Kinerja	Dasar Hukum : a. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang b. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2022 tentang Ruang Terbuka Hijau Definisi Operasional : Ruang Terbuka Hijau adalah ruang terbuka hijau Taman, Makam, Jalur Hijau dan Hutan. Ditargetkan dilakukan penambahan RTH setiap tahunnya seluas 1 Ha (0,0015%) dari hasil serah terima fasos fasum. Metode Pengukuran : Luas total ruang terbuka hijau di tahun (n) dibagi luas daratan DKI Jakarta dikali 100%. Luas daratan DKI Jakarta 66.150 ha atau 661.5 km2 Sumber Data : Pengukuran Mandiri	5,357	5,357	5,357	5,597	5,597	Persentase
2	Peningkatan Tutupan Lahan Melalui Perluasan Ruang Terbuka Hijau Hutan Kota	Indeks Kualitas Lahan	Sistem Monev Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Definisi Operasional : Indeks Kualitas Lahan adalah Nilai yang menggambarkan kualitas lahan dalam suatu wilayah pada waktu tertentu berdasarkan luas tutupan lahan. Metode Pengukuran : IKL = 100-[(84,3-(ITL x 100)) x 50 : 54,3] Sumber Data : Pengukuran Mandiri	N/A	N/A	N/A	27,75	27,75	Nilai
3	Peningkatan Kualitas Sebaran Ruang Terbuka Hijau	Persentase wilayah kelurahan dengan infrastruktur hijau - biru terintegrasi	Sistem Monev Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau b. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2022 tentang Ruang Terbuka Hijau Definisi Operasional : Infrastruktur hijau-biru terintegrasi adalah penyediaan sumur resapan/bioswale/kolam retensi/rain	30,34	30,34	30,34	34	34	Persentase

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				<p>garden /lembung pada lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikelola oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota.</p> <p>Metode Pengukuran : Jumlah kelurahan yang memiliki infrastruktur hijau-biru dibagi jumlah total kelurahan di 5 wilayah DKI Jakarta (262 kelurahan) dikali 100%.</p>						
4	Peningkatan Kualitas Lahan dan Hutan	Persentase penambahan luas dan kualitas lahan ruang terbuka hijau hutan	Sistem Monev Kinerja	<p>Dasar Hukum :</p> <p>a. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau</p> <p>b. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2022 tentang Ruang Terbuka Hijau</p> <p>Definisi Operasional : Persentase luas hutan dibawah pengelolaan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota yang telah dilakukan pembangunan/penataan/penghijauan dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas hutan. Adapun keseluruhan luas lahan hutan yang dikelola oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota adalah 299,72 Ha.</p> <p>Metode Pengukuran : Luas pembangunan/penataan/penghijauan hutan dibagi Luas hutan yang dikelola Dinas Pertamanan dan Hutan Kota dikali 100%</p> <p>Sumber Data : Pengukuran Mandiri</p>	N/A	N/A	N/A	78,25	78,25	Persentase
Sasaran Relevan Lainnya										
5	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respon perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum :</p> <p>a. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika</p> <p>b. Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penyusunan Strategi Komunikasi Rencana Kinerja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta</p> <p>Definisi Operasional : a. Persentase tersusunnya strategi komunikasi program prioritas dan strategis Daerah. b. Persentase terpublikasikannya materi komunikasi melalui media internal Perangkat Daerah terpilih atau media massa atau media sosial atau aktivitas komunikasi lainnya. c. Persentase respon terhadap krisis komunikasi. d. Persentase respon interaktif terhadap pertanyaan/komentar warganet yang relevan.</p> <p>Metode Pengukuran : a. Bobot 35%: PD dengan program prioritas dan strategis menyusun strategi komunikasi program prioritas dan strategis Daerah. b. Bobot 30%: PD dengan program prioritas dan strategis mempublikasikan materi komunikasi melalui media internal Perangkat Daerah atau media massa atau media sosial atau aktivitas komunikasi lainnya.</p>	100	100	100	100	100	Persentase

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				c. Bobot 20%: PD dengan program prioritas dan strategis memberikan respon terhadap krisis komunikasi. d. Bobot 15%: PD dengan program prioritas dan strategis memberikan respon interaktif terhadap pertanyaan/komentar warganet yang relevan. Sumber Data : https://komunikasi.jakarta.go.id/Login						
6	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang telah diubah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, Dan Pelaporan Barang Milik Daerah; c. Keputusan Gubernur Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penetapan Inventarisasi Bertahap Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang Tahun 2023-2027. Definisi Operasional: Capaian Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang. Metode Pengukuran: a. Bobot 5% PD/UKPD menyusun SK Tim Inventarisasi dan memvalidasi Daftar BMD b. Bobot 85% PD/UKPD melakukan pendataan dan identifikasi BMD sesuai dengan jumlah BMD yang dimiliki c. Bobot 10% PD/UKPD menyusun Berita Acara, SPTJM dan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) (Diukur berdasarkan progress capaian PD/UKPD dalam sistem Inventarisasi KIB E dan ATB (Polarisasi Data: Maximize)) Sumber Data : https://jakaset.jakarta.go.id/inventarisasi/pr/login	5	25	55	100	100	Persentase
7	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi b. Keputusan Gubernur Nomor 785 tahun 2025 tentang Daftar Data Tahun 2025 Definisi Operasional : Nilai Kualitas Data SDI terdiri atas 4 aspek yaitu: a. Aspek Ketepatan Waktu : Mengukur kepatuhan waktu pengumpulan data oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal. b. Aspek Kelengkapan Data : Mengukur kelengkapan komponen data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal. c. Aspek Keunikan Isi Data : Mengukur tingkat duplikasi data yang dikumpulkan oleh Produsen Data	N/A	N/A	N/A	3,25	3,25	Nilai

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber data	Pengukuran Kinerja	Target Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				<p>melalui Walidata Pendukung kepada Walidata.</p> <p>d. Aspek Validitas Data : Mengukur validitas data oleh Produsen Data</p> <p>Metode Pengukuran :</p> <p>Nilai Kualitas Data SDI = [(Nilai Aspek Ketepatan Waktu) + (Nilai Aspek Kelengkapan Data) + (Nilai Aspek Keunikan Isi Data) + (Nilai Aspek Validitas Data)]</p> <p>(Rentang nilai kualitas data SDI: 0 - 4)</p> <p>Keterangan :</p> <p>a. Nilai Aspek Ketepatan Waktu = (Jumlah data terkumpul ke walidata / Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai ketentuan)</p> <p>b. Nilai Aspek Kelengkapan Data = (Jumlah file data yang memiliki komponen lengkap / Jumlah file data sesuai ketentuan)</p> <p>c. Nilai Aspek Keunikan Isi Data = (Jumlah file data yang tidak memiliki duplikasi pada variabel kunci / Jumlah file data sesuai ketentuan)</p> <p>d. Nilai Aspek Validitas Data = (Jumlah file data yang tervalidasi oleh produsen data / Jumlah file data sesuai ketentuan)</p> <p>Catatan :</p> <p>a. Batas waktu pengumpulan data adalah tanggal 5 bulan berikutnya dari jadwal rilis</p> <p>b. Batas akhir perbaikan data adalah tanggal 20 bulan berikutnya dari jadwal rilis</p> <p>Sumber Data :</p> <p>Portal Data Provinsi DKI Jakarta</p>						
8	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Capaian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum :</p> <p>a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;</p> <p>b. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri;</p> <p>c. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan</p> <p>d. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p> <p>Definisi Operasional :</p> <p>a. Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia ditunjukkan dengan Sertifikat TKDN dan/atau pernyataan penyedia telah menggunakan produk dalam negeri (<i>self declare</i>).</p> <p>b. Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menjelaskan kandungan dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa.</p> <p>c. Belanja Pengadaan adalah belanja barang/jasa, belanja hibah barang, belanja bantuan sosial barang, dan belanja modal (melalui Penyedia dan Swakelola) dengan kode rekening:</p> <p>5.2.02 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin</p> <p>5.1.02 - Belanja Barang dan Jasa</p> <p>5.1.05.01.02.0001 - Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat</p>	N/A	100	N/A	100	100	Persentase

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				5.1.06.03.02.0001 - Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 5.2.02 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.03 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.04 - Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.05 - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.2.06 - Belanja Modal Lainnya Metode Pengukuran : Jumlah realisasi Belanja Pengadaan bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri dibandingkan dengan realisasi pembayaran (SPJ) Belanja Pengadaan dengan Target Kinerja pada Triwulan II sekurang-kurangnya 30% (<i>Polarisasi Data: Maximize</i>) dan Triwulan IV dengan Target Kinerja dalam rentang 80% – 100% (<i>Polarisasi Data: Stabilize</i>). Sumber Data : a. Bigbox Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) b. Sistem Pengadaan Secara Elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SPSE LKPP) c. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) P3DN Kementerian Dalam Negeri atau Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) DKI Jakarta (BPKD) Sumber Data akan diolah oleh Tim P3DN Provinsi DKI Jakarta pada Triwulan II dengan Target Kinerja sekurang-kurangnya 30% (<i>Polarisasi Data: Maximize</i>) dan Triwulan IV dengan Target Kinerja dalam rentang 80% – 100% (<i>Polarisasi Data: Stabilize</i>).						
9	Terwujudnya Lingkungan Organisasi yang mendorong Pembelajaran, Kolaborasi dan Berbagi Pengetahuan	Persentase implementasi berbagi pengetahuan melalui Komunitas Pembelajar	e-Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan. Definisi Operasional : Terlaksananya Budaya Berbagi Pengetahuan melalui kegiatan komunitas pembelajar (<i>Community of Practice</i>) Metode Pengukuran : Realisasi pelaksanaan berbagi pengetahuan melalui kegiatan komunitas pembelajar (<i>Community of Practice</i>) Penghitungan: TW I : Bobot 10% : PD/UKPD menyusun SK Kepala Perangkat Daerah tentang Pembentukan Komunitas Pembelajar dan Agenda Kegiatan Komunitas Pembelajar Tahun 2025 TW II, III dan IV : a. Bobot 5%: PD melaksanakan kegiatan Komunitas Pembelajar sesuai Agenda yang telah disusun. b. Bobot 10%: Kegiatan Komunitas Pembelajar yang dilaksanakan menghasilkan Aset Pengetahuan dan diunggah pada portal KM (https://km-bpsdm.jakarta.go.id) c. Bobot 15%: Aset Pengetahuan yang dihasilkan Kegiatan Komunitas Pembelajar dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD.	10	40	70	100	100	Persentase

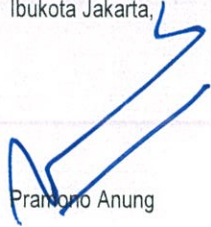
Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				<p><i>Output</i> Sasaran :</p> <p>1 (satu) Dokumen SK Kepala Perangkat Daerah tentang Pembentukan Komunitas Pembelajar dan Agenda Kegiatan Komunitas Pembelajar Tahun 2025 TW I</p> <p>1 (satu) Dokumen Kegiatan Berbagi Pengetahuan dan Aset Pengetahuan yang dihasilkan, maksimal minggu kedua di bulan Juni dan dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD untuk target TW II</p> <p>1 (satu) Dokumen Kegiatan Berbagi Pengetahuan dan Aset Pengetahuan yang dihasilkan, maksimal minggu kedua di bulan September dan dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD untuk target TW III</p> <p>1 (satu) Dokumen Kegiatan Berbagi Pengetahuan dan Aset Pengetahuan yang dihasilkan, maksimal minggu kedua di bulan Desember dan dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD untuk target TW IV</p> <p>Sumber Data : https://km-bpsdm.jakarta.go.id</p>						
10	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum :</p> <p>a. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;</p> <p>b. Keputusan Gubernur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.</p> <p>Definisi Operasional :</p> <p>Proses Manajemen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui 5 (lima) tahapan:</p> <p>a. Komunikasi dan konsultasi;</p> <p>b. Penetapan konteks;</p> <p>c. Penilaian Risiko (Identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko);</p> <p>d. Penanganan Risiko; dan</p> <p>e. Pemantauan.</p> <p>Pemantauan dilakukan untuk memantau pelaksanaan rencana aksi penanganan Risiko, dan tren perubahan besaran/Level Risiko</p> <p>Laporan pemantauan dituangkan pada format Formulir Laporan Pemantauan Risiko.</p> <p>Metode Pengukuran :</p> <p>$\left[\frac{\text{Jumlah dokumen yang terverifikasi oleh Inspektorat}}{\text{Seluruh dokumen yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada triwulan 4}} \right] \times 100\%$</p> <p><i>Output</i> Sasaran :</p> <p>Triwulan I:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Penilaian Risiko Tahun 2025 - Dokumen Rencana Penanganan Risiko Tahun 2025 	67	N/A	N/A	100	100	Persentase

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber data	Pengukuran Kinerja	Target Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				Triwulan IV: Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko Tahun 2025 Metode Pengukuran : Tersajinya dokumen-dokumen Implementasi Penerapan Manajemen Risiko yang telah diverifikasi oleh Inspektorat : Triwulan I: - Dokumen Penilaian Risiko Tahun 2025 - Dokumen Rencana Penanganan Risiko Tahun 2025 Triwulan IV: Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko Tahun 2025 Sumber Data : Aplikasi SI Perisai (Inspektorat)						
11	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	e-Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 195 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan diumumkan kepada masyarakat diantaranya digunakan untuk membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah. Definisi Operasional : Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi. a. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. b. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran. Metode Pengukuran : Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut a. Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/subkegiatan dengan bobot 43,5%; b. Efisiensi keluaran kegiatan/subkegiatan dengan bobot 28,6%; c. Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan 18,2%; dan d. Penyerapan Anggaran dengan bobot 9,7%. Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan : a. ≤ 60 = Rendah b. > 60 s.d 70 = cukup c. > 70 s.d 90 = Baik	N/A	N/A	N/A	71	71	Persentase

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				<p>> 90 s.d 100 = Sangat Baik</p> <p>Hasil perhitungan TW IV 2025 akan menjadi target dalam penilaian TW II 2026</p> <p>Sumber Data : BPKD</p>						
12	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Survei Kepuasan Masyarakat	Jaksurvei	<p>Dasar Hukum :</p> <p>a. Peraturan Menteri Pembudayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan SKM UPP</p> <p>b. Peraturan Gubernur Nomor 197 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan SKM terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p> <p>c. Keputusan Gubernur DKI Nomor 426 Tahun 2022 tentang UPP Pelaksana SKM</p> <p>Definisi Operasional :</p> <p>Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik merupakan hasil survei kepuasan kepada masyarakat yang dilakukan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik</p> <p>Metode Pengukuran :</p> <p>Metode pengukuran mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017, dimana masyarakat melakukan penilaian kepuasan terhadap layanan dalam rentang angka skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat), dengan rentang penilaian persepsi sebagai berikut:</p> <p>a. Nilai Persepsi 1, dengan nilai interval IKM sebesar 1,00 – 2,59, atau nilai interval konversi 25.00 – 64,99;</p> <p>b. Nilai Persepsi 2, dengan nilai interval IKM sebesar 2,60 – 3,06, atau nilai interval konversi 65.00 – 76,60;</p> <p>c. Nilai Persepsi 3, dengan nilai interval IKM sebesar 3,07 – 3,53, atau nilai interval konversi 76,61 – 88,30;</p> <p>d. Nilai Persepsi 4, dengan nilai interval IKM sebesar 3,54 – 4,00, atau nilai interval konversi 88,31 – 100,00.</p> <p>Nilai IKM diperoleh dari hasil survei kepuasan masyarakat melalui sistem Jaksurvei</p> <p>Sumber Data : Jaksurvei</p>	93,89	93,89	93,89	93,89	93,89	Persentase
13	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum :</p> <p>Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pemantauan TLHP BPK dan APIP</p> <p>Definisi Operasional :</p> <p>Persentase progres penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) adalah perbandingan antara jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan kriteria penyelesaian yang ditetapkan terhadap total rekomendasi yang diberikan</p>	25	25	25	25	100	Persentase

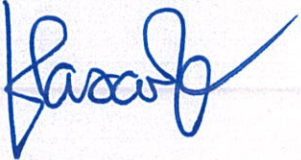
			<p>Metode Pengukuran : (90% dari jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya / jumlah sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dari LHP BPK RI tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)</p> <p>Sumber Data : Aplikasi SI Mantab (Inspektorat)</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Prandono Anung

Jakarta, 2025
Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



M Fajar Sauri
NIP 197011181998031002

RENCANA AKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI TAHUN 2025

Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
Sasaran Strategis									
1	Penyediaan Ruang Terbuka dan Infrastruktur Hijau yang Inklusif dan Berkualitas	Persentase Ruang Terbuka Hijau	5,597%	RA1. Meningkatkan Kualitas Data dan Informasi Fasos Fasum melalui Verifikasi dan Validasi Kondisi Lahan Fasos Fasum	KK1.1. Tersedianya Data dan Informasi Kondisi Lokasi Fasos Fasum yang Valid dan Akurat sebanyak 200 Lokasi	T/O1.1.1. Laporan Validasi, Verifikasi dan Penginputan Data 50 Lokasi Lahan Fasos Fasum	1 Laporan	TW I	1. Sekretaris Dinas 2. Kepala Unit Pengadaan Tanah
						T/O1.1.2. Laporan Validasi, Verifikasi dan Penginputan Data 50 Lokasi Lahan Fasos Fasum	1 Laporan	TW II	1. Sekretaris Dinas 2. Kepala Unit Pengadaan Tanah
						T/O1.1.3. Laporan Validasi, Verifikasi dan Penginputan Data 50 Lokasi Lahan Fasos Fasum	1 Laporan	TW III	1. Sekretaris Dinas 2. Kepala Unit Pengadaan Tanah
						T/O1.1.4. Laporan Validasi, Verifikasi dan Penginputan Data 50 Lokasi Lahan Fasos Fasum	1 Laporan	TW IV	1. Sekretaris Dinas 2. Kepala Unit Pengadaan Tanah
				RA2. Melaksanakan koordinasi dalam rangka proses serah terima lahan fasos fasum Pengelola Aset Daerah Kepada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	KK2.1. Terlaksananya koordinasi dalam rangka proses serah terima lahan fasos fasum Pengelola Aset Daerah Kepada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	T/O2.1.1. Laporan koordinasi dengan BPAD	1 Laporan	TW I	1. Sekretaris Dinas 2. Kepala Unit Pengadaan Tanah
						T/O2.1.2. Laporan koordinasi dengan BPAD	1 Laporan	TW II	1. Sekretaris Dinas 2. Kepala Unit Pengadaan Tanah
						T/O2.1.3. Laporan koordinasi dengan BPAD	1 Laporan	TW III	1. Sekretaris Dinas 2. Kepala Unit Pengadaan Tanah
						T/O2.1.4. Laporan koordinasi dengan BPAD	1 Laporan	TW IV	1. Sekretaris Dinas 2. Kepala Unit Pengadaan Tanah
				RA3. Meningkatkan Ketersediaan RTH melalui Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Taman, Jalur Hijau, Makam dan Kebun Bibit	KK3.1. Terselenggaranya 18 lokasi Pembangunan RTH dengan rincian sbb : 15 Lokasi Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Taman, 1 Lokasi Pembangunan Jalur Hijau, 1 Lokasi Pembangunan Makam dan 1 Lokasi Pembangunan Kebun Bibit	T/O3.1.1. Dokumen Perencanaan 18 lokasi Pembangunan RTH	18 Dokumen	TW I	1. Kepala Bidang Pertamanan 2. Kepala Bidang Pemakaman 3. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota - Kota Administrasi Jakarta Utara 4. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota - Kota Administrasi Jakarta Barat 5. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota - Kota Administrasi Jakarta Timur 6. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota - Kota Administrasi Jakarta Selatan 7. Kepala Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan
						T/O3.1.2. Dokumen Kontrak Pengadaan Barang dan/atau Jasa 18 Lokasi Pembangunan RTH	18 Dokumen	TW II	
						T/O3.1.3. Laporan Penyelesaian Pembangunan Ruang Terbuka Hijau di 8 Lokasi	1 Laporan	TW III	
						T/O3.1.4. Laporan Penyelesaian Pembangunan Ruang Terbuka Hijau di 10 Lokasi	1 Laporan	TW IV	
				RA4. Meningkatkan kualitas RTH eksiting di bawah pengelolaan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	KK4.1. Terpeliharanya 1.663,22 Ha RTH	T/O4.1.1. Laporan Pemeliharaan 1.663,22 Ha Ruang Terbuka Hijau	1 Laporan	TW I	1. Kepala Bidang Pertamanan 2. Kepala Bidang Jalur Hijau 3. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota - Kota Administrasi Jakarta Pusat 4. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota - Kota Administrasi Jakarta Utara 5. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota - Kota Administrasi Jakarta Barat
						T/O4.1.2. Laporan Pemeliharaan 1.663,22 Ha Ruang Terbuka Hijau	1 Laporan	TW II	
						T/O4.1.3. Laporan Pemeliharaan 1.663,22 Ha Ruang Terbuka Hijau	1 Laporan	TW III	

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
						T/O4.1.4. Laporan Pemeliharaan 1.663,22 Ha Ruang Terbuka Hijau	1 Laporan	TW IV	6. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota - Kota Administrasi Jakarta Timur 7. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota - Kota Administrasi Jakarta Selatan 8. Kepala Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan 9. Kepala Unit Pengelola Taman Margasatwa Raguna
					KK4.2. Terelesailkannya 56 Dokumen Perencanaan dengan rincian sbb : 24 Lokasi Penataan RTH Taman, 8 Lokasi Penataan Jalur Hijau, 20 Lokasi Makam dan 4 Lokasi Kebun Bibit	T/O4.2.1. Dokumen Perencanaan 25 Lokasi Penataan RTH	25 Dokumen	TW I	1. Kepala Bidang Pertamanan 2. Kepala Bidang Jalur Hijau 3. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota - Kota Administrasi Jakarta Pusat 4. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota - Kota Administrasi Jakarta Utara
						T/O4.2.2. Dokumen Perencanaan 31 Lokasi Penataan RTH	31 Dokumen	TW II	5. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota - Kota Administrasi Jakarta Barat 6. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota - Kota Administrasi Jakarta Timur 7. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota - Kota Administrasi Jakarta Selatan
						T/O4.2.3. Dokumen Kontrak Pengadaan Barang dan/atau Jasa 25 Lokasi Penataan RTH	25 Dokumen	TW II	8. Kepala Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan
						T/O4.2.4. Dokumen Kontrak Pengadaan Barang dan/atau Jasa 31 Lokasi Penataan RTH	31 Dokumen	TW III	
						T/O4.2.5. Laporan Penyelesaian 25 Lokasi Penataan Ruang Terbuka Hijau	1 Laporan	TW III	
						T/O4.2.6. Laporan Penyelesaian 31 Lokasi Penataan Ruang Terbuka Hijau	1 Laporan	TW IV	
				RA5. Meningkatkan aksesibilitas RTH taman kepada masyarakat	KK5.1. Terlaksananya aktivasi RTH taman 24 jam	T/O5.1.1. Laporan aktivasi RTH Taman	1 Laporan	TW I	1. Kepala Bidang Pertamanan 2. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota - Kota Administrasi Jakarta Pusat 3. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota - Kota Administrasi Jakarta Utara 4. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota - Kota Administrasi Jakarta Barat 5. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota - Kota Administrasi Jakarta Timur 6. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota - Kota Administrasi Jakarta Selatan 7. Kepala Pusat Data dan Informasi
						T/O5.1.2. Laporan aktivasi RTH Taman	1 Laporan	TW II	1. Kepala Bidang Pertamanan 2. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota - Kota Administrasi Jakarta Pusat 3. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota - Kota Administrasi Jakarta Utara

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
									4. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota - Kota Administrasi Jakarta Barat 5. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota - Kota Administrasi Jakarta Timur 6. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota - Kota Administrasi Jakarta Selatan 7. Kepala Pusat Data dan Informasi
				RA6. Meningkatkan kualitas RTH Jalur Hijau melalui penanaman pohon dengan perakaran kuat	KK6.1. Terlaksananya penanaman pohon dengan perakaran kuat pada jalur Hijau	T/O6.1.1. Laporan penanaman pohon	1 Laporan	TW I	1. Kepala Bidang Jalur Hijau 2. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota - Kota Administrasi Jakarta Timur
						T/O6.1.2. Laporan penanaman pohon	1 Laporan	TW II	1. Kepala Bidang Jalur Hijau 2. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota - Kota Administrasi Jakarta Timur
2	Peningkatan Tutupan Lahan Melalui Perluasan Ruang Terbuka Hijau Hutan Kota	Indeks Kualitas Lahan	27,75	RA1. Meningkatkan Tutupan Lahan melalui Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Hutan Kota	KK1.1. Terselenggaranya Pembangunan 3 Lokasi RTH Hutan Kota	T/O1.1.1. Dokumen Perencanaan 3 Lokasi Pembangunan RTH Hutan Kota	3 Dokumen	TW I	Kepala Bidang Kehutanan
						T/O1.1.2. Dokumen Kontrak Pengadaan Barang dan/atau Jasa 3 Lokasi Pembangunan RTH Hutan Kota	3 Dokumen	TW II	Kepala Bidang Kehutanan
						T/O1.1.3. Laporan Penyelesaian 1 Lokasi Pembangunan RTH Hutan Kota	1 Laporan	TW III	Kepala Bidang Kehutanan
						T/O1.1.4. Laporan Penyelesaian 2 Lokasi Pembangunan RTH Hutan Kota	1 Laporan	TW IV	Kepala Bidang Kehutanan
				RA2. Meningkatkan dan/atau Mempertahankan Kualitas dan/atau Kuantitas Tutupan Lahan melalui Pemeliharaan Hutan Kota	KK2.1. Terpeliharanya 215,1 Ha RTH Hutan Kota	T/O2.1.1. Laporan Pemeliharaan 215,1 Ha Ruang Terbuka Hijau Hutan Kota	1 Laporan	TW I	Kepala Bidang Kehutanan
						T/O2.1.2. Laporan Pemeliharaan 215,1 Ha Ruang Terbuka Hijau Hutan Kota	1 Laporan	TW II	Kepala Bidang Kehutanan
						T/O2.1.3. Laporan Pemeliharaan 215,1 Ha Ruang Terbuka Hijau Hutan Kota	1 Laporan	TW III	Kepala Bidang Kehutanan
						T/O2.1.4. Laporan Pemeliharaan 215,1 Ha Ruang Terbuka Hijau Hutan Kota	1 Laporan	TW IV	Kepala Bidang Kehutanan
					KK2.2. Terselenggaranya 3 Lokasi Penataan Hutan Kota	T/O2.2.1. Dokumen Perencanaan 3 Lokasi Penataan RTH Hutan Kota	3 Dokumen	TW I	Kepala Bidang Kehutanan
						T/O2.2.2. Dokumen Kontrak Pengadaan Barang dan/atau Jasa 3 Lokasi Penataan RTH	3 Dokumen	TW II	Kepala Bidang Kehutanan
						T/O2.2.3. Laporan Penyelesaian 1 Lokasi Penataan Ruang Terbuka Hijau Hutan Kota	1 Laporan	TW III	Kepala Bidang Kehutanan
						T/O2.2.4. Laporan Penyelesaian 2 Lokasi Penataan Ruang Terbuka Hijau Hutan Kota	2 Laporan	TW IV	Kepala Bidang Kehutanan
3	Peningkatan Kualitas Sebaran Ruang Terbuka Hijau	Persentase wilayah kelurahan dengan infrastruktur hijau - biru terintegrasi	34%	RA1. Meningkatkan Wilayah Kelurahan yang memiliki Infrastruktur Hijau - Biru	KK1.1. Tersedianya 10 Infrastruktur Hijau - Biru di Wilayah Kelurahan yang belum memiliki Infrastruktur Hijau - Biru	T/O1.1.1. Dokumen Perencanaan 10 Lokasi Pembangunan Infrastruktur Hijau - Biru	10 Dokumen	TW I	1. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota - Kota Administrasi Jakarta Pusat
						T/O1.1.2. Dokumen Kontrak Pengadaan Barang dan/atau Jasa 10 Lokasi Pembangunan Infrastruktur Hijau - Biru	10 Dokumen	TW2	2. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota - Kota Administrasi Jakarta Utara

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
						T/O1.1.3. Laporan Penyelesaian Pembangunan Infrastruktur Hijau - Biru di 5 Lokasi	1 Laporan	TW3	3. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota - Kota Administrasi Jakarta Barat 4. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota - Kota Administrasi Jakarta Timur
						T/O1.1.4. Laporan Penyelesaian Pembangunan Infrastruktur Hijau - Biru di 5 Lokasi	1 Laporan	TW IV	5. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota - Kota Administrasi Jakarta Selatan
4	Peningkatan Kualitas Lahan dan Hutan	Persentase penambahan luas dan kualitas lahan ruang terbuka hijau hutan	78,25%	RA1. Meningkatkan dan/atau Mempertahankan Kualitas dan/atau Kuantitas Tutupan Lahan melalui Pemeliharaan dan Pengamanan Kawasan Hutan Negara	KK1.1. Terpeliharanya 202,86 Ha Kawasan Hutan	T/O1.1.1. Laporan Pemeliharaan 202,86 Ha Ruang Terbuka Hijau Hutan Lindung dan Hutan Produksi	1 Laporan	TW I	Kepala Bidang Kehutanan
						T/O1.1.2. Laporan Pemeliharaan 202,86 Ha Ruang Terbuka Hijau Hutan Lindung dan Hutan Produksi	1 Laporan	TW II	Kepala Bidang Kehutanan
						T/O1.1.3. Laporan Pemeliharaan 202,86 Ha Ruang Terbuka Hijau Hutan Lindung dan Hutan Produksi	1 Laporan	TW III	Kepala Bidang Kehutanan
						T/O1.1.4. Laporan Pemeliharaan 202,86 Ha Ruang Terbuka Hijau Hutan Lindung dan Hutan Produksi	1 Laporan	TW IV	Kepala Bidang Kehutanan
					KK1.2. Terlindunginya 202,86 Ha Kawasan Hutan	T/O1.2.1 Laporan Pengamanan Hutan di 202,86 Ha Ruang Terbuka Hijau Hutan Lindung dan Hutan Produksi	1 Laporan	TW I	Kepala Bidang Kehutanan
						T/O1.2.2 Laporan Pengamanan Hutan di 202,86 Ha Ruang Terbuka Hijau Hutan Lindung dan Hutan Produksi	1 Laporan	TW II	Kepala Bidang Kehutanan
						T/O1.2.3 Laporan Pengamanan Hutan di 202,86 Ha Ruang Terbuka Hijau Hutan Lindung dan Hutan Produksi	1 Laporan	TW III	Kepala Bidang Kehutanan
						T/O1.2.4 Laporan Pengamanan Hutan di 202,86 Ha Ruang Terbuka Hijau Hutan Lindung dan Hutan Produksi	1 Laporan	TW IV	Kepala Bidang Kehutanan
				RA2. Meningkatkan Tutupan Lahan melalui Penanaman Pohon dan Penanaman Mangrove	KK2.1. Tereleaksangkannya Penanaman 10.000 Batang Pohon dan Penanaman 50.000 Bibit Mangrove	T/O2.1.1. Laporan Penanaman 2.500 Batang Pohon dan 10.000 Bibit Mangrove	1 Laporan	TW I	1. Kepala Bidang Kehutanan 2. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota - Kota Administrasi Jakarta Pusat
						T/O2.1.2. Laporan Penanaman 2.500 Batang Pohon dan 10.000 Bibit Mangrove	1 Laporan	TW II	3. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota - Kota Administrasi Jakarta Utara 4. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota - Kota Administrasi Jakarta Barat
						T/O2.1.3. Laporan Penanaman 2.500 Batang Pohon dan 15.000 Bibit Mangrove	1 Laporan	TW III	5. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota - Kota Administrasi Jakarta Timur
						T/O2.1.4. Laporan Penanaman 2.500 Batang Pohon dan 15.000 Bibit Mangrove	1 Laporan	TW IV	6. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota - Kota Administrasi Jakarta Selatan 7. Kepala Bidang Jalur Hijau
				RA3. Meningkatkan Peran Serta Masyarakat melalui Kolaborasi Penghijauan Lingkungan	KK3.1. Terlaksananya 30 Kegiatan Kolaborasi Penghijauan Lingkungan dengan skema CSR dan/atau Sejenisnya	T/O3.1.1. Tereleaksangkannya 7 Kegiatan Kolaborasi Penghijauan Lingkungan dengan Skema CSR dan/atau Sejenisnya	1 Laporan	TW I	Kepala Bidang Kehutanan

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
						T/O3.1.2 .Terselesaikannya 7 Kegiatan Kolaborasi Penghijauan Lingkungan dengan Skema CSR dan/atau Sejenisnya	1 Laporan	TW II	Kepala Bidang Kehutanan
						T/O3.1.3 .Terselesaikannya 7 Kegiatan Kolaborasi Penghijauan Lingkungan dengan Skema CSR dan/atau Sejenisnya	1 Laporan	TW III	Kepala Bidang Kehutanan
						T/O3.1.4 .Terselesaikannya 9 Kegiatan Kolaborasi Penghijauan Lingkungan dengan Skema CSR dan/atau Sejenisnya	1 Laporan	TW IV	Kepala Bidang Kehutanan
Sasaran Relevan Lainnya									
5	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respon perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program	100%	RA1. Keikutsertaan dalam bimbingan teknis terkait strategi komunikasi publik untuk penyusunan strategi komunikasi program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	KK1.1. Terselesaikannya bimbingan teknis strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	T/O1.1.1. Dokumen hasil mengikuti bimbingan teknis strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	1 Laporan	TW I	Kepala Pusat Data dan Informasi
						T/O1.1.2. Dokumen hasil mengikuti bimbingan teknis strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	1 Laporan	TW II	Kepala Pusat Data dan Informasi
						T/O1.1.3. Dokumen hasil mengikuti bimbingan teknis strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	1 Laporan	TW III	Kepala Pusat Data dan Informasi
						T/O1.1.4. Dokumen hasil mengikuti bimbingan teknis strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	1 Laporan	TW IV	Kepala Pusat Data dan Informasi
				RA2. Evaluasi implementasi strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	KK2.1. Terlaksananya evaluasi implementasi strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	T/O2.1.1. Dokumen hasil evaluasi implementasi strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	1 Dokumen	TW I	Kepala Pusat Data dan Informasi
						T/O2.1.2. Dokumen hasil evaluasi implementasi strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	1 Dokumen	TW II	Kepala Pusat Data dan Informasi
						T/O2.1.3. Dokumen hasil evaluasi implementasi strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	1 Dokumen	TW III	Kepala Pusat Data dan Informasi
						T/O2.1.4. Dokumen hasil evaluasi implementasi strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	1 Dokumen	TW IV	Kepala Pusat Data dan Informasi
6	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	100%	RA1. Menyusun tim Inventarisasi BMD dan Daftar BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	KK1.1. Tersusunnya tim Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dan validasi daftar BMD	T/O1.1.1. SK Tim Inventarisasi pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	1 Dokumen	TW I	1. Sekretaris Dinas 2. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota - Kota Administrasi Jakarta Pusat 3. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota - Kota Administrasi Jakarta Utara
						T/O1.1.2. Daftar BMD yang sudah tervalidasi	1 Dokumen	TW I	4. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota - Kota Administrasi Jakarta Barat

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
									5. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota - Kota Administrasi Jakarta Timur 6. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota - Kota Administrasi Jakarta Selatan 7. Kepala Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan 8. Kepala Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan
				RA2. Melaksanakan Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	KK2.1. Terlaksananya kegiatan Inventarisasi BMD sebesar 25% dari keseluruhan jumlah register pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang sebagai target TW2, sebesar 55% dari keseluruhan jumlah register pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang sebagai target TW3, sebesar 100% dari keseluruhan jumlah register pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang sebagai target TW4	T/O2.1.1. Laporan Capaian Pelaksanaan Inventarisasi BMD per Triwulan	1 Laporan	TW II	1. Sekretaris Dinas 2. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota - Kota Administrasi Jakarta Pusat 3. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota - Kota Administrasi Jakarta Utara
						T/O2.1.2. Laporan Capaian Pelaksanaan Inventarisasi BMD per Triwulan	1 Laporan	TW III	4. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota - Kota Administrasi Jakarta Barat 5. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota - Kota Administrasi Jakarta Timur 6. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota - Kota Administrasi Jakarta Selatan
						T/O2.1.3. Laporan Capaian Pelaksanaan Inventarisasi BMD per Triwulan	1 Laporan	TW IV	7. Kepala Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan 8. Kepala Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan
				RA3. Menyusun Pelaporan Kegiatan Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	KK3.1. Tersedianya Berita Acara, SPTJM dan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang sebagai hasil dari kegiatan Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud	T/O3.1.1. Berita Acara, SPTJM dan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI)	3 Dokumen	TW IV	1. Sekretaris Dinas 2. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota - Kota Administrasi Jakarta Pusat 3. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota - Kota Administrasi Jakarta Utara 4. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota - Kota Administrasi Jakarta Barat 5. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota - Kota Administrasi Jakarta Timur 6. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota - Kota Administrasi Jakarta Selatan 7. Kepala Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan 8. Kepala Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan
7	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	3,25	RA1. Mengikuti rangkaian perencanaan data	KK1.1. Tersedianya Berita Acara Daftar Data Perangkat Daerah Tahun 2026	T/O1.1.1. Berita Acara Daftar Data Perangkat Daerah Tahun 2026	1 Berita Acara	TW IV	Kepala Pusat Data dan Informasi

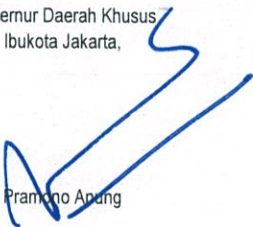
Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
				RA 2. Menyediakan data lingkup Perangkat Daerah sesuai Daftar Data Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025	KK2.1. Tersedianya data lingkup Perangkat Daerah yang memenuhi kualitas aspek validitas, kelengkapan data, ketepatan waktu, dan keunikan isi data	T/O2.1.1. Laporan data SDI lingkup Perangkat Daerah yang berkualitas sesuai aspek validitas, kelengkapan data, ketepatan waktu, dan keunikan isi data pada Bulan Desember 2024 sampai dengan Bulan Februari 2025 sesuai capaian pada Portal Satu Data Jakarta.	1 Laporan	TW I	Kepala Pusat Data dan Informasi
						T/O2.1.2 Laporan data SDI lingkup Perangkat Daerah yang berkualitas sesuai aspek validitas, kelengkapan data, ketepatan waktu, dan keunikan isi data pada Bulan Maret 2025 sampai dengan Bulan Mei 2025 sesuai capaian pada Portal Satu Data Jakarta.	1 Laporan	TW II	Kepala Pusat Data dan Informasi
						T/O2.1.3. Laporan data SDI lingkup Perangkat Daerah yang berkualitas sesuai aspek validitas, kelengkapan data, ketepatan waktu, dan keunikan isi data pada Bulan Juni 2025 sampai dengan Bulan Agustus 2025 sesuai capaian pada Portal Satu Data Jakarta.	1 Laporan	TW III	Kepala Pusat Data dan Informasi
						T/O2.1.4. Laporan data SDI lingkup Perangkat Daerah yang berkualitas sesuai aspek validitas, kelengkapan data, ketepatan waktu, dan keunikan isi data pada Bulan September 2025 sampai dengan Bulan November 2025 sesuai capaian pada Portal Satu Data Jakarta.	1 Laporan	TW IV	Kepala Pusat Data dan Informasi
8	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Capaian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	100%	RA1. Membentuk dan/atau Memperbarui Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada Perangkat Daerah	KK1.1. Tersusunnya SK Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada Perangkat Daerah	T/O1.1.1. SK Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada Perangkat Daerah	1 Dokumen	TW I	Sekretaris Dinas
				RA2. Mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan Melakukan Penandaan (<i>tagging</i>) Produk Dalam Negeri melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)	KK2.1. Terumumkannya Rencana Umum Pengadaan (RUP) dengan Total Nilai RUP Sebesar 100% dari Anggaran Pengadaan Barang/Jasa dan Paket Pengadaan yang Tertandai (<i>tagging</i>) Produk Dalam Negeri Sekurang-kurangnya 80% dari Anggaran Pengadaan Barang/Jasa melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)	T/O2.1.1. Hasil Rekapitulasi Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan Penandaan (<i>tagging</i>) Produk Dalam Negeri melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)	1 Dokumen	TW I	Sekretaris Dinas
				RA3. Mencantumkan Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap KAK/Spesifikasi Teknis/Kontrak/Surat Pesanan Pengadaan Barang/Jasa; serta Memastikan Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST Tidak Lebih Rendah daripada Kewajiban dalam KAK/Spesifikasi Teknis/Kontrak/Surat Pesanan.	KK3.1. Terdapat Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap KAK/Spesifikasi Teknis/Kontrak/Surat Pesanan Pengadaan Barang/Jasa; dan Terdapat Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST.	T/O3.1.1. Hasil Rekapitulasi Pencantuman Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dan Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST.	1 Laporan	TW I	1. Sekretaris Dinas 2. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota - Kota Administrasi Jakarta Pusat 3. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota - Kota Administrasi Jakarta Utara
						T/O3.1.2. Hasil Rekapitulasi Pencantuman Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dan Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST.	1 Laporan	TW II	4. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota - Kota Administrasi Jakarta Barat 5. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota - Kota Administrasi Jakarta Timur
						T/O3.1.3. Hasil Rekapitulasi Pencantuman Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dan Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST.	1 Laporan	TW III	6. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota - Kota Administrasi Jakarta Selatan

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
						T/O3.1.4. Hasil Rekapitulasi Pencantuman Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dan Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST.	1 Laporan	TW IV	7. Kepala Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan 8. Kepala Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan\
				RA4. Melaksanakan Kewajiban Belanja Kegiatan Penyediaan Makan/Minum melalui e-Order	KK4.1. Terlaksananya Seluruh Kegiatan Penyediaan Makan/Minum Menggunakan Produk Usaha Mikro Kecil dan Koperasi melalui e-Order	T/O4.1.1. Laporan Hasil Belanja Kegiatan Penyediaan Makan/Minum melalui e-Order	1 Laporan	TW I	1. Sekretaris Dinas 2. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota - Kota Administrasi Jakarta Pusat 3. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota - Kota Administrasi Jakarta Utara
						T/O4.1.2. Laporan Hasil Belanja Kegiatan Penyediaan Makan/Minum melalui e-Order	1 Laporan	TW II	4. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota - Kota Administrasi Jakarta Barat
						T/O4.1.3. Laporan Hasil Belanja Kegiatan Penyediaan Makan/Minum melalui e-Order	1 Laporan	TW III	5. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota - Kota Administrasi Jakarta Timur
						T/O4.1.4. Laporan Hasil Belanja Kegiatan Penyediaan Makan/Minum melalui e-Order	1 Laporan	TW IV	6. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota - Kota Administrasi Jakarta Selatan 7. Kepala Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan 8. Kepala Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan
				RA5. Melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri	KK5.1. Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri	T/O5.1.1. Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri	1 Laporan	TW I	1. Sekretaris Dinas 2. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota - Kota Administrasi Jakarta Pusat
						T/O5.1.2. Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri	1 Laporan	TW II	3. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota - Kota Administrasi Jakarta Utara
						T/O5.1.3. Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri	1 Laporan	TW III	4. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota - Kota Administrasi Jakarta Barat
						T/O5.1.4. Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri	1 Laporan	TW IV	5. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota - Kota Administrasi Jakarta Timur
									6. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota - Kota Administrasi Jakarta Selatan 7. Kepala Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan 8. Kepala Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan
9	Terwujudnya Lingkungan Organisasi yang mendorong Pembelajaran, Kolaborasi dan Berbagi Pengetahuan	Persentase implementasi berbagi pengetahuan melalui Komunitas Pembelajar	100%	RA1. Melaksanakan Sosialisasi Manajemen Pengetahuan dan Komunitas Pembelajaran	KK1.1. Meningkatnya pemahaman ASN tentang Manajemen pengetahuan	T/O1.1.1. Terbentuknya Komunitas Pembelajar dan Agenda Kegiatan Komunitas Pembelajar Tahun 2025 melalui Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah	1 Dokumen	TW I	1. Sekretaris Dinas 2. Kepala Pusat Data dan Informasi
				RA2. Menyusun Dokumentasi dan Aset Pengetahuan Hasil Komunitas Pembelajar	KK2.1. Terlaksananya Kegiatan Komunitas Pembelajar	T/O2.1.1. Tersedianya Dokumentasi Kegiatan Komunitas Pembelajar dan Tersedianya Dokumen aset pengetahuan	2 Dokumen	TW II	1. Sekretaris Dinas 2. Kepala Pusat Data dan Informasi

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
						T/O2.1.2. Tersedianya Dokumentasi Kegiatan Komunitas Pembelajar dan Tersedianya Dokumen aset pengetahuan	2 Dokumen	TW III	1. Sekretaris Dinas 2. Kepala Pusat Data dan Informasi
						T/O2.1.3. Tersedianya Dokumentasi Kegiatan Komunitas Pembelajar dan Tersedianya Dokumen aset pengetahuan	2 Dokumen	TW IV	1. Sekretaris Dinas 2. Kepala Pusat Data dan Informasi
10	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	100%	RA1. Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Risiko bagi para Pejabat ditetapkan sebagai Manajer Risiko, Koordinator Risiko dan Pemilik Risiko	KK1.1. Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Risiko bagi para Pejabat ditetapkan sebagai Manajer Risiko, Koordinator Risiko dan Pemilik Risiko	T/O1.1.1. Tersedianya Laporan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Risiko yang diikuti Manajer Risiko, Koordinator Risiko dan Pemilik Risiko	1 Dokumen	TW I	Sekretaris Dinas
				RA2. Menyelenggarakan Sosialisasi Implementasi Manajemen Risiko pada Seluruh Pegawai	KK2.1. Terlaksananya Sosialisasi Implementasi Manajemen Risiko pada Seluruh Pegawai	T/O2.1.1. Tersedianya Laporan Sosialisasi Implementasi Manajemen Risiko pada Seluruh Pegawai	1 Dokumen	TW II	Sekretaris Dinas
				RA3. Melakukan Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko	KK3.1. Terlaksananya Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko	T/O3.1.1. Tersedianya Laporan Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko	1 Dokumen	TW II	Sekretaris Dinas
				RA4. Melakukan Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko	KK4.1. Terlaksananya Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko	T/O4.1.1. Tersedianya Laporan Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko	1 Dokumen	TW IV	Sekretaris Dinas
11	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	71%	RA1. Menyusun target keluaran kegiatan/subkegiatan pada sistem monev Bappeda	KK1.1. Tersusunnya target keluaran kegiatan/subkegiatan pada sistem e-sakip	T/O1.1.1. Data target keluaran kegiatan/subkegiatan pada monev Bappeda	1 Data	TW I	Sekretaris Dinas
				RA2. Menyusun Serapan Perkiraan Sendiri (SPS) target bulanan proyeksi penyerapan APBD dalam proyeksi APBD/ proyeksiapbd.jakarta.go.id	KK2.1. Tersusunnya Serapan Perkiraan Sendiri pada sistem arget bulanan proyeksi penyerapan APBD dalam proyeksi APBD/ proyeksiapbd.jakarta.go.id	T/O2.1.1. data SPS pada sistem proyeksiapbd.jakarta.go.id	1 Data	TW I	Sekretaris Dinas
				RA3. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi.	KK3.1. Tercapainya kinerja anggaran atas target keluaran dan implementasi SPS.	T/O3.1.1. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas target keluaran dan implementasi SPS.	1 Laporan	TW I	Sekretaris Dinas
						T/O3.1.2. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas target keluaran dan implementasi SPS.	1 Laporan	TW II	Sekretaris Dinas
						T/O3.1.3. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas target keluaran dan implementasi SPS.	1 Laporan	TW III	Sekretaris Dinas
						T/O3.1.4. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas target keluaran dan implementasi SPS.	1 Laporan	TW IV	Sekretaris Dinas
12	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Survei Kepuasan Masyarakat	93.89%	RA.1. Melakukan analisis dan penyelesaian tindak lanjut atas unsur Survei Kepuasan Masyarakat dengan hasil penilaian rendah	KK1.1. Tersedianya data hasil analisis, strategi dan/atau rencana tindak lanjut atas unsur Survei Kepuasan Masyarakat dengan hasil penilaian terendah	T/O1.1.1. Laporan pelaksanaan SKM yang memuat : - data hasil analisis penilaian unsur penilaian terendah periode berjalan - strategi dan/atau rencana tindak lanjut atas unsur penilaian terendah periode berjalan	1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	TW I TW II TW III TW IV	Kepala Pusat Data dan Informasi Kepala Pusat Data dan Informasi Kepala Pusat Data dan Informasi Kepala Pusat Data dan Informasi
					KK1.2. Tersedianya hasil tindak lanjut atas unsur Survei Kepuasan Masyarakat dengan hasil penilaian terendah	T/O1.2.1. Laporan hasil tindak lanjut SKM yang memuat : - penyelesaian tindak lanjut atas unsur penilaian terendah periode sebelumnya - hasil monitoring dan evaluasi terhadap penyelesaian tindak lanjut atas unsur penilaian terendah periode sebelumnya	1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	TW I TW II TW III TW IV	Kepala Pusat Data dan Informasi Kepala Pusat Data dan Informasi Kepala Pusat Data dan Informasi Kepala Pusat Data dan Informasi
13	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	100%	RA1. Menyusun strategi penyelesaian atas TLHP BPK RI	KK1.1. Tersedianya rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	T/O1.1.1. Dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK T/O1.1.2. Dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Dokumen 1 Dokumen	TW I TW II	Kepala Unit Pengadaan Tanah Kepala Unit Pengadaan Tanah

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
						T/O1.1.3. Dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Dokumen	TW III	Kepala Unit Pengadaan Tanah
						T/O1.1.4. Dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Dokumen	TW IV	Kepala Unit Pengadaan Tanah
					KK1.2. Tersedianya hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	T/O1.2.1. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Laporan	TW I	Kepala Unit Pengadaan Tanah
						T/O1.2.2. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Laporan	TW II	Kepala Unit Pengadaan Tanah
						T/O1.2.3. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Laporan	TW III	Kepala Unit Pengadaan Tanah
						T/O1.2.4. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Laporan	TW IV	Kepala Unit Pengadaan Tanah

Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Pramono Anung

Jakarta, 2025

Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota
Provinsi DKI Jakarta,



M Fajar Sauri
NIP. 197011181998031002